

## DISFEMISME PADA PEMBERITAAN KORUPSI DI MEDIA MASSA DARING

Reka Yuda Mahardika<sup>1</sup>, Indra Nugrahayu Taufik<sup>2</sup>

<sup>1</sup> IKIP Siliwangi, Cimahi, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Indonesia

<sup>1</sup> rekayuda@ikipsiliwangi.co.id, <sup>2</sup> indranugrahayu@gmail.com

Received: Desember 9, 2022; Accepted: February 2, 2023

### Abstract

This research is motivated by the increasing corruption in Indonesia. Meanwhile, the punishment applied is still not effective, so additional social punishment is needed in the mass media. The purpose of this study is to examine the various meanings and constructors that give rise to dysphemism in the online mass media Okezone.com. This study uses a descriptive semantic approach to 30 reports related to corruption. Based on the results of the analysis found 21 words and 51 phrases that can be categorized as dysphemism. This dysphemism can be seen in the limitation of views, marginalization, classification, cynicism, and sarcasm used to create a bad image for corruption and corruptors. Meanwhile, from a semantic perspective, at least four categorizations of meaning are found, namely denotative which is used for the purpose of describing corruption with its true meaning. The connotative meaning is used to include negative sense values. The meaning of the metaphor is used to compare corruption and corruptors with negative things. The meaning of euphemism is associated with corruption which has a negative image.

**Keywords:** Dysphemism, Corruption, Descriptive Semantics

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi semakin meningkatnya korupsi di Indonesia. Sementara hukuman yang diterapkan masih belum efektif sehingga dibutuhkan tambahan hukuman sosial di media massa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ragam makna dan konstruksi pembangun yang memunculkan disfemisme di media massa daring Okezone.com. Penelitian ini menggunakan pendekatan semantic deskriptif atas 30 pemberitaan berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan hasil analisis ditemukan 21 kata dan 51 frasa yang dapat dikategorikan bermakna disfemisme. Pendisfemisme tersebut tampak dalam pembatasan pandangan, pamarjinalan, pengklasifikasian, sinisme, dan sarkasme yang digunakan untuk membuat korupsi dan para koruptor bercitra buruk. Sementara dalam perspektif semantik, setidaknya ditemukan empat kategorisasi makna, yaitu denotatif yang digunakan untuk tujuan menggambarkan korupsi dengan makna sebenarnya. Makna konotatif digunakan untuk memasukkan nilai rasa negatif. Makna metafora digunakan untuk membandingkan korupsi dan para koruptor dengan hal yang negatif. Makna eufemisme diasosiasikan dengan korupsi yang sudah bercitra negatif.

**Kata Kunci:** disfemisme, korupsi, semantik deskriptif

**How to Cite:** Mahardika, R. Y., Taufik, I. N. (2023). Disfemisme pada pemberitaan korupsi di media massa daring. *Semantik*, 12 (1), 75-88.

### PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi momok bagi masyarakat Indonesia sekarang dan kemungkinan hingga waktu yang akan datang. Fluktuasinya bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) terjadi peningkatan jumlah perkara dan terdakwa korupsi tahun 2021 dibandingkan 2018, 2019, dan 2020. Selain itu, rentang usia terdakwa korupsi yang semakin muda dan semakin tua, yaitu 24 dan 79 tahun, menjadi

persoalan tersendiri yang harus diwaspadai (Radityo, 2022). ICW pun mencatat nilai potensi kerugian negara cenderung terus meningkat selama periode 2017-2021 (Dihni, 2022). Riwukore et al. (2020) bahkan mengatakan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia paling tinggi dan menunjukkan tren meningkat bila dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya yang justru mengalami tren penurunan. Sodoran fakta tersebut menunjukkan korupsi sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus diselesaikan dengan cara yang juga luar biasa. Bahkan menurut Astuti (2013) kejahatan ini tidak hanya luar biasa melainkan sudah menjadi kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang pelakunya harus dihukum berat.

Beragam upaya dilakukan untuk memberantas korupsi. Sinergitas KPK dengan kepolisian dan kejaksaan menjadi kekuatan utama karena memiliki kewenangan memberikan efek jera melalui hukum pidana. Selain itu inisiasi diberlakukannya pendidikan karakter berupa kejujuran sejak dini baik di lingkungan keluarga dan sekolah menjadi kekuatan lainnya yang tidak dapat dikesampingkan. Terlebih Sulistiyo et al. (2020) mengatakan penanaman pendidikan sejak dini merupakan isu global untuk mengatasi degradasi etika dan moral yang mulai menjangkiti generasi muda. Terakhir, kontrol pemuka agama dalam mewacanakan dogma keharaman korupsi menjadi kekuatan lainnya yang penting untuk direalisasikan (Sosiawan, 2017). Meski beragam upaya telah diinisiasi dan direalisasikan hasilnya masih belum menunjukkan tren yang menggembirakan. Simarmata (2021) memaparkan teknis korupsi di Indonesia malah menunjukkan perkembangan mulai dari penyuapan, pencurangan, penggelapan dana, jual beli jabatan, penggelembungan dana, hingga gratifikasi, dan bisa terus berkembang karena korupsi senantiasa akan mengikuti pola hidup manusianya yang materialistik.

Media massa memiliki *standing position* sendiri dalam upaya pemberantasan korupsi. Posisi tersebut harus dimaksimalkan karena sebagai anjing penjaga (*watch dog*), Natalia (2019) mengatakan media massa dapat menampilkan pemberitaan berbagai penyelewengan termasuk korupsi. Melalui pemberitaan yang masif media dapat mendisfemismekan bahasa korupsi yang akan berdampak hukuman sosial bagi para koruptor. Disfemisme terhadap bahasa korupsi diharapkan dapat menambah amunisi hukuman selain melalui hukuman pidana dan ancaman dogma agama. Dampak tersebut tentu sangat logis karena media selain memiliki fungsi *transmission of values* (Dominick dalam Halik, 2013), juga memiliki fungsi memengaruhi, mengontrol, dan mengatur realitas sosial (Fowler, 1991).

Pemaparan dalam paragraf di atas menjadi dasar pentingnya kajian mengenai disfemisme bahasa korupsi sebagai hukuman sosial bagi para koruptor. Sementara itu, Okezone.com dipilih karena menjadi media yang paling sering diakses peringkat kedua di tahun 2019 (Untari, 2019) kemudian meningkat menjadi peringkat pertama di tahun 2021 (Hadi, 2021). Dengan peringkat teratas Okezone.com tentu memiliki jangkauan pembaca yang luas dan besar sehingga lebih efektif dalam mendisfemismekan dan memburukkan korupsi dan para koruptor. Sebagaimana dikatakan DeVito (Elvinaro, 2007) yang memaparkan fungsi media massa secara khusus adalah untuk meyakinkan serta mempengaruhi. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bahasa disfemisme yang digunakan Okezone.com dalam pemberitaan berkaitan dengan korupsi.

Disfemisme menjadi objek menarik sehingga sering dikaji oleh banyak peneliti. Di antaranya Duda (2011) menulis penelitian berjudul “Uphemisms And Dysphemisms: In Search of A Boundary Line”. Hasil penelitiannya beroleh temuan bahwa ada mekanisme dalam bahasa yang disebut eufemisme, digunakan untuk menghindari pernyataan bersifat disfemisme yang

dianggap tidak sopan atau bodoh. Kemudian Husek et al. (2017) menulis penelitian berjudul “*Measuring Stigma Affecting Sex Workers (SW) and Men who Have Sex with Men (MSM): A Systematic Review*” yang beroleh temuan bahwa ada stigma bagi pekerja seks antarpria (gay) sebagai populasi kunci sumber HIV dan penular HIV. Burrige (2012) meneliti mengenai “*Euphemism and Language Change: The Sixth and Seventh Ages*” yang mengulas fungsi eufemisme dan disfemisme pada perspektif penamaan kuno dan modern dalam karya Shakespeare. Ristanto (2019) yang meneliti “Efek Penggunaan Disfemia dalam Teks Media”. Penelitian Ristanto beroleh temuan penggunaan bahasa disfemime memberikan efek nilai rasa mengasarkkan, menakutkan, merendahkan, dan menjijikkan. Anjani & Ginanjar (2021) meneliti “Fenomena Disfemisme dalam Kartun Anak pada Pertelevision Indonesia” yang beroleh temuan disfemisme dalam tayangan kartun anak berupa 1) perbandingan manusia dengan hewan, 2) julukan yang berasal dari organ tubuh yang ditabukan, 3) julukan yang abnormal, 4) kutukan, 5) disfemisme sexist, racist, speciesist, classist, ageist yang berfungsi sebagai penghinaan, dan 6) istilah penghinaan pada karakter yang dituju.

Penelitian berkaitan disfemisme memang relatif banyak. Namun demikian, penelitian ini memiliki kabaruan dan tujuan, yaitu mengkhususkan mengkaji ragam makna dan konstruksi pembangun yang memunculkan disfemisme di media massa daring Okezone.com yang berkaitan dengan pemberitaan korupsi. Kekhususan tersebut belum pernah dikaji oleh peneliti mana pun sehingga menjadi penting untuk dilaksanakan. Adapun kontribusi penelitian ini secara teoretis dan praktis adalah untuk memperkaya khasanah penelitian kebahasaan, khususnya berkaitan dengan korelasi antara bahasa disfemisme dan korupsi. Selain itu bermanfaat juga bagi para pembaca agar memahami bahwa penggunaan bahasa dapat berdampak bagi hukuman sosial terhadap para koruptor dan tidak ada pemberitaan yang bebas nilai. Hal tersebut diperkuat Ahmadi, Kurniawan, & Kusumawardhani (2022) yang mengatakan bahwa setiap pemberitaan di media tidak pernah netral, namun selalu disusupi ideologi, sikap, dan kepentingan tertentu.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Mahsun (2017) adalah penelitian yang memfokuskan pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Pendekatan utama yang digunakan yaitu pendekatan semantik deskriptif. Ullman (1953) mengatakan semantik deskriptif merupakan kajian mengenai distribusi kosakata bersinonim yang dapat mencerminkan makna dalam pemikiran tertentu dan melekat pada kepentingan tertentu pula. Berlandaskan pada pendapat Ullman, makna kosakata yang dikaji dalam penelitian ini kemudian dideskripsikan dan ditafsirkan baik secara leksikal, konseptual, maupun asosiatif. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan cerminan dan pemikiran tertentu yang dimiliki oleh organisasi pemroduksi kosakata tersebut. Selain itu, penelitian ini juga meminjam pendekatan kritis dalam bentuk analisis kosakata yang disodorkan Fowler (1991). Anshori (2018) mengatakan pendekatan kritis digunakan untuk menangkap fenomena yang terdapat dalam pemberitaan media massa. Masih menurut Anshori, melalui pendekatan ini data bahasa akan lebih diketahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara mendalam. Pendekatan ini pun memungkinkan peneliti ikut serta dalam menafsirkan data-data bahasa yang tersirat dan memberi tafsir atas konstruksi konteks dan maksud dari sebuah komunikasi massa tertulis. Asad et al. (2021) mengatakan pendekatan kritis merupakan teknik penganalisisan teks yang terkait dengan konteks sosial.

Shaw & Bailey (dalam Habiburrahim et al., 2020) mengatakan penelitian analisis kebahasaan dapat mengambil data dari percakapan, interaksi, simbol, dan dokumen. Berdasarkan hal

tersebut data penelitian ini diambil dari 30 pemberitaan berkaitan dengan korupsi yang didokumentasikan Agustus-November 2022 dalam media massa daring Okezone.com. Pengumpulan data menggunakan metode baca, catat, dan studi pustaka. Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan identifikasi data berupa kata dan frasa bermakna disfemisme terhadap korupsi dan para koruptor.
- 2) Melakukan klasifikasi dan kategorisasi data sesuai dengan aspek yang diamati, yaitu mengkategorisasikan disfemisme berdasarkan unsur semantik.
- 3) Membahas data menggunakan Semantik dan pendekatan kritis Fowler, yaitu dengan cara menafsirkannya menggunakan teori pengklasifikasian, pamarjinalan, pembatasan pandangan, dan pertarungan wacana.
- 4) Menyimpulkan hasil penelitian.

Untuk menjamin data agar valid, dilakukan teknik pengabsahan data dengan teknik ketekunan. Minto (2002) mengatakan teknik ketekunan, dilakukan dengan membaca data secara berulang-ulang berdasarkan teori yang digunakan sehingga hasilnya bisa valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Deskripsi Bahasa Korupsi berdasarkan Kategori Kata dan Frasa

Dalam bab pendahuluan telah dipaparkan mengenai pentingnya hukuman bagi para koruptor. Hukuman tersebut tidak hanya direalisasikan dalam bentuk hukum pidana dan ancaman dogma agama, melainkan juga hukuman sosial di media massa dalam bentuk disfemisme, yaitu pengasaran, penjelekan, dan penghujatan (Glück dalam Husna et al., 2000) terhadap korupsi dan para koruptor. Dengan upaya tersebut diharapkan para koruptor mendapatkan efek jera dan efektif dalam mengurangi dan mencegah tindakan korupsi.

Dari hasil analisis teks terhadap 30 berita bertopik korupsi di Okezone.com ditemukan 21 kata dan 51 frasa yang dapat dikategorikan bermakna disfemisme. Kata dan frasa yang ditemukan dikategorisasikan bermakna disfemisme dengan cara diamati makna leksikal dan kontekstualnya. Dalam hal ini terdapat kata-kata yang memiliki makna disfemisme secara jelas, misalnya terdapat dalam kata *jahat* yang secara leksikal bermakna sangat jelek, serakah bermakna rakus, penyelewengan bermakna pengkhianatan, pemerasan bermakna cara memeras, dan lainnya. Meski demikian, terdapat kata yang memiliki makna lebih jelas bila berada dalam sebuah frasa. Hal tersebut karena sebuah frasa menurut Chaer (2006) dapat dilengkapi atributif/modifikator yang membuat maknanya lebih komprehensif. Misalnya, kata *titipan* akan memiliki makna yang lebih jelas bila berada dalam sebuah frasa *titipan jatah uang*. Begitu juga kata *bermain* akan lebih jelas konotasi negatifnya bila berada dalam frasa *bermain kebijakan*.

Disfemisme memiliki fungsi yang membedakannya dari jenis makna lainnya. Berdasarkan data dalam pemberitaan, disfemisme digunakan untuk menunjukkan ketidaksepakatan, merendahkan, dan menghina perilaku maupun pelakunya. Misalnya, terdapat dalam kata dan frasa *penyelewengan*, *keserakahan*, *momok*, *lemah*, *buronan*, *menyedihkan*, *persekongkolan jahat*, *minim integritas*, *penghuni neraka*, *sangat jahat*, dan lainnya. Hal tersebut dikuatkan Allan & Burrige (2011) yang memaparkan fungsi disfemisme, yaitu untuk menjatuhkan lawan, menunjukkan ketidaksepakatan, membicarakan hal yang rendah, dan menghina.

Dengan fungsi tersebut disfemisme secara logis tentu memiliki manfaat dan dampak, yaitu sebagai hukuman sosial berupa pembentukan citra buruk bagi para koruptor. Pembentukan tersebut terjadi karena hal-hal yang berkaitan dengan korupsi dibahasakan dengan bahasa disfemisme berkonotasi negatif dan peyoratif.

Selain itu, korupsi dan segala hal yang terkait dengannya juga didisfemismekan dengan cara dibatasi pandangan, dimarjinalisasi, dan diklasifikasi yang menurut Fowler (1991) hal-hal tersebut dapat digunakan sebagai strategi pertarungan wacana untuk mengubah persepsi khalayak. Misalnya, terdapat dalam kata *keserakahan* yang membatasi pandangan bahwa para koruptor merupakan orang yang bersifat serakah, *pemerasan* yang merupakan klasifikasi kata yang menggambarkan salah satu modus yang dilakukan para koruptor, kata jahat yang memarjinalisasi koruptor sebagai orang yang jahat. Begitu juga dalam frasa persekongkolan jahat yang bersifat membatasi pandangan bahwa para koruptor merupakan pelaku kejahatan yang biasa bersekongkol, minim integritas yang mengklasifikasikan bahwa para koruptor merupakan orang yang tidak memiliki integritas, dan memarjinalisasi para koruptor dengan frasa memperkaya diri sendiri, masuk daftar hitam, dan sangat jahat.

Disfemisme dituliskan juga dalam bentuk bahasa sinisme yang di antaranya tampak dalam kata-kata seperti *bermain* yang bermakna para koruptor menganggap korupsi merupakan *sebuah permainan*. *Jatah* bermakna uang korupsi dianggap sebagai bagian yang wajar diterima, *titipan* bermakna para koruptor menganggap hasil korupsi sebagai titipan bagi dirinya, *penerimaan* bermakna para koruptor menganggap korupsi sebagai bagian dari penerimaan yang berhak ia peroleh. *Kegagalan* bermakna para koruptor menganggap tidak berhasil korupsi dianggap sebagai kegagalan, *pemberian dan penerimaan hadiah* yang bermakna hasil korupsi dianggap sebagai *pemberian dan hadiah*, *menciderai nilai-nilai luhur*, bermakna korupsi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Bertanggung jawab atas semua perbuatannya bermakna koruptor seharusnya bertanggung jawab atas semua perbuatannya, *kerap bermain* bermakna para koruptor selalu bermain untuk menguntungkan dirinya, *jual beli jabatan* bermakna jabatan layak untuk dijualbelikan, dan lainnya. Kata-kata tersebut masuk dalam kategori sinisme karena kedudukannya tidak lebih kasar dibandingkan sarkasme.

Media massa daring Okezone.com menggunakan juga disfemisme dalam kategori sarkasme untuk membuat citra buruk korupsi. Menurut Keraf (1998) Disfemisme dalam kategori ini harus mengandung celaan yang selalu menyakiti hati. Kata-kata yang bernada sarkasme di antaranya terdapat dalam kata *pemerasan* yang dapat ditafsirkan para koruptor kerap melakukan tindakan kriminal berupa pemerasan kepada para korbannya, *keserakahan* yang bermakna para koruptor merupakan tokoh yang selalu tidak puas dan ingin meraup semuanya, *buruk* yang menggambarkan mereka yang terkait dengan korupsi merupakan orang yang berperilaku buruk. *Momok* yang menganggap perilaku korup dan pelakunya menjadi hal yang menakutkan, *jahat*, dan *persekongkolan jahat* merepresentasikan para koruptor memiliki sifat yang buruk dan bekerja sama untuk merealisasikan keburukannya, *ingkar janji* bermakna para koruptor bukanlah orang yang amanah dan jujur. *Penghuni neraka* merepresentasikan para koruptor pasti bila sudah mati akan menghuni neraka, *memperkaya diri sendiri* menggambarkan para koruptor *bersifat egois*, *daftar hitam* menggambarkan para koruptor layak dikenang oleh negara karena kejahatannya, *hukuman mati* menggambarkan para koruptor merupakan penjahat yang tidak terampuni sehingga layak dihukum mati, *miskinkan koruptor* merepresentasikan para koruptor yang harus dimiskinkan karena mereka sangat jahat. Berikut

Tabel 1 yang memuat temuan kata dan frasa disfemisme korupsi di Media Massa Okezone.com.

**Tabel 1.** Temuan Kata dan Frasa Disfemisme

No.	Kategori Bentuk	Diksi
1.	Kata	1) pemerasan, 2) kolusi, 3) bermain, 4) ancam 5) mangkir, 6) jahat, 7) penyelewengan, 8) keserakahan, 9) konsumerisme, 10) gagal, 11) buruk, 12) kejahatan, 13) momok, 14) titipan, 15) penerimaan, 16) suap 17) kurungan, 18) lemah, 19) buronan, 20) jahat, 21) menyedihkan
2.	Frasa	1) persekongkolan jahat, 2) suap gratifikasi, 3) aliran uang, 4) pencucian uang, 5) mematok atau memasang tarif, 6) transaksi keuangan janggal, 7) transaksi mencurigakan, 8) mengalir ke rumah judi, 9) sepakat adanya pembagian fee, 10) memenangkan proyek, 11) kerugian negara, 12) lemah sistem, 13) minim integritas, 14) barang rampasan, 15) pemberian dan penerimaan hadiah, 16) ingkar janji, 17) nepotisme, 18) menciderai nilai-nilai luhur, 19) sanksi moral, 20) pelaku tindak kejahatan, 21) terjerat kasus korupsi, 22) transaksi keuangan yang janggal, 23) mencurigakan, 24) menyalahi aturan pemerintah, 25) bertanggung jawab atas semua perbuatannya, 26) kolusi dan korupsi 27) penghuni neraka, 28) permainan uang, 29) terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi, 30) aliran uang, 31) kerap bermain, 32) mematok atau memasang tarif, 33) jual beli jabatan, 34) rembesan atau penyalahgunaan, 35) utang ke negara, 36) tidak menghormati hukum, 37) tidak menghargai aturan hukum, 38) merugikan keuangan negara, 39) memperkaya diri sendiri, 40) memperkaya orang lain, 41) memperkaya korporasi, 42) merugikan keuangan negara, 43) koruptor termuda berusia 25 tahun, 44) berbagi hasil, 45) daftar hitam, 46) hukuman mati, 47) menguasai asset secara tidak sah, 48) miskin koruptor, 49) sangat jahat, 50) laporan fiktif, 51) dibuat jera.

Berdasarkan kategori unsur semantik ditemukan pengelompokan diksi yang kecenderungannya masuk dalam kategori denotatif, konotatif, metafora, dan eufemisme. Bila dielaborasi lebih mendalam sebenarnya dapat ditemukan beberapa kategori lagi. Namun demikian, penelitian ini hanya memfokuskan pada temuan keempat kategori yang telah disebutkan sebelumnya.

### Denotatif

Makna denotatif dalam penelitian ini dapat disinonimkan dengan makna leksikal dan makna konseptual. Makna ini digunakan dalam pemberitaan dengan tujuan menggambarkan korupsi dengan makna sebenarnya, langsung, dan tidak multitafsir. Dalam terminologi Barthes (Wibisono & Sari, 2021) denotasi merupakan sistem bahasa dengan signifikasi tingkat pertama yang diasosiasikan dengan ketertutupan. Melalui kata bermakna denotasi khalayak akan diajak untuk memahami korupsi dengan penuh keterbukaan tanpa adanya penafsiran berbeda. Contohnya *kolusi* digunakan untuk menggambarkan adanya kerjasama tidak terpuji

antarkoruptor. *Konsumerisme* yang bermakna gaya hidup bermewah-mewah yang biasa menjadi penyebab korupsi. *Jahat* yang menggambarkan para koruptor berperilaku buruk. *Transaksi keuangan* menggambarkan bahwa perilaku korup selalu diakhiri dengan transaksi keuangan. *Keserakahan* yang menggambarkan para koruptor merupakan individu yang tamak dan rakus. *Ingkar janji* menggambarkan para koruptor bukanlah individu yang amanah. Selain itu, masih banyak kata-kata bermakna denotatif lainnya yang ditemukan, seperti *buronan*, *koruptor termuda*, *gratifikasi*, *keuntungan pribadi*, *transaksi mencurigakan*, *merugikan*, dan lainnya.

### Konotatif

Makna konotatif termasuk juga idiom digunakan dalam pemberitaan untuk memasukkan nilai rasa. Dengan kata bermakna konotasi, khalayak akan mendapatkan persepsi negatif yang lebih kuat mengenai korupsi. Misalnya, idiom *daftar hitam* digunakan untuk menggambarkan para koruptor sebagai individu yang berbahaya. *Aliran uang* menggambarkan uang haram yang terus didapatkan ibarat air yang terus mengalir. *Mengalir ke rumah judi* menggambarkan uang yang didapat haram digunakan untuk kegiatan haram pula, yaitu judi. *Miskinkan koruptor* dan *hukuman mati* digunakan untuk menggambarkan kegeraman khalayak yang menginginkan para koruptor mendapatkan hukuman terberat (mati) hingga dimiskinkan. *Penghuni neraka* menggambarkan para koruptor yang dipastikan dan diancam menjadi penghuni neraka. Kosakata bermakna konotatif lainnya yang ditemukan, yaitu *pencucian uang*, *kerap bermain*, *lemah sistem*, *pemberian dan penerimaan hadiah*, *jual beli jabatan*, *menciderai nilai-nilai luhur*, *menguasai asset secara tidak sah*, *terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi*, *pemerasan*, *bermain*, *titipan*, *kurungan*. Penggunaan kata bermakna konotasi menurut Barthes (Wibisono & Sari, 2021) berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks ini korupsi dibenarkan sebagai perilaku buruk menggunakan kosakata bermakna konotasi negatif.

### Metafora

Kata bermakna metafora sesungguhnya dapat tumpang tindih dengan kategori makna konotatif. Hal ini disebabkan keduanya masuk dalam kategori kata yang bermakna tidak sebenarnya. Namun demikian, dalam kategori ini sudah dipilih beberapa kata yang dapat dimasukkan dalam kategori metafora karena berisi perbandingan. *Pemerasan* bermakna para koruptor melakukan tindakan pemerasan kepada korbannya. *Aliran uang* menggambarkan uang yang didapatkan para koruptor seakan tidak berhenti ibarat aliran. *Pencucian uang* menggambarkan modus para koruptor ketika mendapatkan uang haram, yaitu *mencuci*-nya dengan beragam cara agar dianggap sebagai uang *bersih*. *Kerap bermain* menggambarkan para koruptor yang dianggap terbiasa mendapatkan uang haram sehingga korupsi oleh mereka diibaratkan dengan *bermain*. *Daftar hitam* bermakna para koruptor sudah dimasukkan dan dianggap sebagai individu yang berbahaya. *Jual beli jabatan* menggambarkan korupsi sebagai perbuatan yang biasa sehingga diibaratkan sebagai kegiatan transaksi jual beli. *Pemberian dan penerimaan hadiah* bermakna uang korupsi sudah dianggap sebagai uang yang halal karena diibaratkan sebagai hadiah, baik oleh penyuap maupun yang disuap. Kosakata lainnya adalah *permainan uang*, berbagi hasil, mengalir ke rumah judi, dan terjerat kasus korupsi. Menurut Kress (dalam Anshori, 2018) makna metafora digunakan oleh pemilik kekuasaan agar makna kata yang dihasilkan hanya diketahui pihak-pihak tertentu.

### Eufemisme

Kosakata bermakna eufemisme juga digunakan dalam menggambarkan korupsi. Kosakata jenis ini meski bermakna halus, namun tetap berasosiasi dengan korupsi yang negatif. Sehingga kata

bermakna eufemisme, tidak dapat dianggap sebagai upaya untuk menghaluskan makna korupsi. Contohnya kata *fee* merupakan eufemisme dari suap, uang haram, dan korupsi, *Memenangkan proyek* merupakan penghalusan dari korupsi karena dalam konteks ini proyek yang dimenangkan berasosiasi dengan jalan yang tidak dibenarkan. *Pemberian dan penerimaan hadiah* berasosiasi dengan suap sebagai tindakan yang erat kaitannya dengan korupsi. *Kerap bermain* bermakna upaya yang dilakukan para koruptor untuk korupsi. *Rembesan* bermakna eufemisme sebagai gambaran uang korupsi yang merembes diterima oleh berbagai pihak. Uang korupsi juga dianggap sebagai buah kerja yang hasilnya harus dibagikan ke berbagai pihak sehingga dieufemismekan dengan kata *berbagi hasil*. BurrIDGE (2012) mengatakan kata bermakna eufemisme digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang tidak disenangi karena beragam alasan dalam tujuan komunikasi dan pada situasi tertentu.

Data bahasa korupsi berdasarkan kategori semantik dapat dicermati dalam Tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 2. Deskripsi Bahasa Korupsi berdasarkan Kategori Semantik**

No.	Kategori Semantik	Diksi
1.	Denotatif	<i>kolusi, konsumerisme, gagal, kejahatan, buronan, koruptor termuda berusia 25 tahun, sangat jahat, keserakahan, kejahatan, jahat, gratifikasi, transaksi keuangan, ingkar janji, nepotisme, kasus korupsi, transaksi mencurigakan, korupsi, merugikan keuangan negara,</i>
2.	Konotatif	<i>daftar hitam, aliran uang, pencucian uang, mengalir ke rumah judi, kerap bermain, lemah sistem, pemberian dan penerimaan hadiah, jual beli jabatan, miskin koruptor, menciderai nilai-nilai luhur, penghuni neraka, kerap bermain, rembesan, atau penyalahgunaan, hukuman mati, menguasai asset secara tidak sah, terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi pemerasan, bermain, titipan, kurungan</i>
3.	Metafora	<i>pemerasan, bermain, aliran uang, pencucian uang, permainan uang, kerap bermain, berbagi hasil, daftar hitam, jual beli jabatan mengalir ke rumah judi, pemberian dan penerimaan hadiah, terjerat kasus korupsi</i>
4.	Eufemisme	<i>sepakat adanya pembagian fee, memenangkan proyek, pemberian dan penerimaan hadiah, transaksi keuangan yang janggal, transaksi mencurigakan, kerap bermain, rembesan, berbagi hasil</i>

Media massa memiliki pengaruh dan kekuatan untuk mengubah persepsi masyarakat. Hal tersebut tentu logis karena media massa akan selalu mampu mengubah cara masyarakat dalam memandang sesuatu hal (Altheide, 2007). Perubahan tersebut umumnya terjadi tidak serta merta, melainkan bergerak terstruktur, terencana, teragenda, dan terproses. Bermula dari informasi di media, hal yang awalnya dipersepsikan baik bisa berubah menjadi buruk, pun sebaliknya. Pernyataan tersebut dikukuhkan Lippmann (Sofiana, et al. 2013) yang mengatakan media massa memiliki kemampuan mengonstruksi interpretasi dan persepsi masyarakat, bahkan secara radikal, mengenai suatu realitas dan pola tindakan. Kemampuan tersebut tentu dimungkinkan karena fungsi media massa di antaranya, yaitu penafsiran (*interpretation*) dan penyebaran nilai (*transmission of value*) (Elvinaro, 2007). Selain itu, teori klasik Jarum Hipodermik, juga menunjukkan kekuatan media yang berpengaruh besar terhadap masyarakat karena memandang isi media sebagai sebuah obat yang disuntikan ke dalam pembuluh darah audiens dan akan bereaksi sebagaimana yang diharapkan (Anwas, 2011).



Dengan kemampuan mengubah persepsi dan interpretasi masyarakat, media massa sering dijadikan tumpuan bukan hanya sebagai penyebar informasi, namun juga sebagai “polisi” untuk kontrol sosial dan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam masyarakat. Sebagai polisi untuk kontrol sosial dan nilai-nilai, media massa tidak hanya bertugas untuk menjaga, namun juga menghukum siapa pun yang melanggar nilai tersebut. Bahasa, tentu saja menjadi satu senjata yang dapat digunakan media massa dalam menjaga dan menghukum para pelanggar, termasuk para koruptor. Dalam hal ini disfemisme yang digunakan media massa dapat digunakan untuk membuat citra buruk (stigmatisasi) bagi para para koruptor sehingga mereka akan mendapat hukuman sosial. Hukuman yang diharapkan dapat melengkapi hukum pidana dan hukum melalui dogma agama. Dalam bahasa Anshori (2018) dengan adanya stigmatisasi berkelanjutan dan masif yang diproduksi media massa diharapkan dapat menyebabkan para pelaku merasa malu dan jera. Disfemisme berupa kata dan frasa digunakan sebagai instrumen untuk membuat citra buruk korupsi dan pelakunya. Kedua hal tersebut digunakan dengan mengasosiasikannya pada pengklasifikasian, pemarjinalan, dan pembatasan pandangan yang bermuara pada keberpihakan media massa atas pemberitaan (pertarungan wacana) (Fowler, 1991). Keempat hal yang diutarakan Fowler tersebut dapat ditemukan pada temuan kosakata berkategori semantis, baik yang bermakna denotatif, konotatif, metafora, maupun eufemisme.

Pengklasifikasian dalam kata bermakna metafora dan konotasi, dapat ditemukan di antaranya dalam kata *bermain*, *aliran uang*, *pencucian uang*, *permainan uang*, *kerap bermain*, *berbagi hasil*, dan *daftar hitam* merupakan pengklasifikasian kata yang sengaja didisfemismekan. Tujuannya tentu menstigmatisasi korupsi dan para pelakunya. Kata *bermain* merupakan klasifikasi kata yang dipilih untuk menggambarkan korupsi sebagai hal yang dianggap kesenangan. *Aliran uang* merupakan pengklasifikasian kata yang bermakna uang hasil korupsi mengalir ke berbagai arah. *Pencucian uang* merupakan pengklasifikasian yang bermakna, para koruptor mengetahui status uang yang diterima adalah haram. Sehingga mereka berstrategi dengan cara menyamarkan uang tersebut seolah uang yang diterima adalah halal. Pengklasifikasian kata lainnya, yaitu *berbagi hasil* bermakna para koruptor terbiasa membagi hasil korupsinya ke berbagai pihak. *Daftar hitam* bermakna para koruptor sesungguhnya sudah dianggap sebagai kelompok orang yang berbahaya dan merugikan negara.

Pengklasifikasian dalam kata bermakna denotatif juga ditujukan untuk mendisfemismekan korupsi dan para koruptor. Pengklasifikasian terdapat dalam kata-kata seperti *konsumerisme* yang menganggap para koruptor umumnya orang yang sangat konsumtif dalam berbelanja barang mewah. Itulah sebabnya konsumerisme berkaitan dengan klasifikasi kata lainnya, yaitu *serakah*, bermakna kelompok orang yang tidak pernah puas dengan harta halal. *Kejahatan* dan *sangat jahat* bermakna para koruptor merupakan kategori orang yang bukan hanya jahat, melainkan sangat jahat bila dikaitkan dengan konteks sekarang. *Ingkar janji* juga merupakan klasifikasi kata yang bermakna para koruptor merupakan orang yang tidak dapat dipercaya. Pengklasifikasian dalam kata bermakna eufemisme, di antaranya tampak dalam kata *pembagian fee*, *pemberian hadiah*, dan *penerimaan hadiah*. Kata *pembagian fee* merupakan klasifikasi kata yang menggambarkan hasil koruptor dianggap sebagai *fee* atau bayaran. Dampaknya, para koruptor akan menganggap bayaran tersebut sebagai pemberian yang halal. Kata tersebut juga berkaitan dengan *pembagian* dan *penerimaan hadiah*. Klasifikasi dua kata tersebut merepresentasikan hasil koruptor dianggap sebagai hadiah yang tentu saja halal untuk diterima.

Pengklasifikasian seperti dalam analisis di atas, dalam pendekatan kritis menunjukkan bahwa bahasa merepresentasikan hal yang tidak pernah netral (Fiske, 2004; Cervera, Postigo, & Herrero, 2006). Berkaitan dengan hal ini dapat dikatakan, sebuah pemberitaan meski memiliki realitas tunggal, seringkali dibahasakan berbeda. Tentu saja perbedaan sekait penggunaan bahasa tidak dapat dipahami sebagai persoalan teknis belaka. Eriyanto (2012) mengatakan bahwa perbedaan berkaitan dengan penggunaan bahasa berkaitan dengan keberpihakan media atas sebuah berita.

Marjinalisasi adalah kondisi dan proses yang mencegah individu atau kelompok dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang dinikmati oleh masyarakat luas (Alakhunova et al., 2015). Dalam pemberitaan korupsi, Okezone.com menggunakan kata bermakna marjinalisasi dengan tujuan mendisfemisme korupsi dan para koruptor. Marjinalisasi dapat menjadi instrumen hukuman sosial bagi para koruptor karena berasosiasi negatif, bermakna pengasingan, pengabaian, bahkan pejajahan (Derana, 2016).

Marjinalisasi dalam kata bermakna konotasi dan metafora, di antaranya tampak dalam kata atau frasa daftar hitam, mengalir ke rumah judi, miskin koruptor, menciderai nilai-nilai luhur, penghuni neraka, pemerasan, dan bermain. Koruptor dimarjinalisasi dengan frasa daftar hitam, bermakna mereka adalah kelompok berbahaya yang bisa merugikan negara. Koruptor juga dimarjinalisasi dengan frasa mengalir ke rumah judi, bermakna para koruptor dianggap sering menghamburkan hartanya untuk judi. Marjinalisasi lainnya terdapat dalam frasa miskin koruptor, bermakna hukuman para koruptor tidak cukup dengan pidana, melainkan juga harus menyentuh pemiskinan. Penghuni neraka merupakan bentuk marjinalisasi, seolah para koruptor sudah pasti akan masuk dalam neraka. Para koruptor juga dianggap menciderai nilai-nilai luhur, sehingga mereka dianggap sebagai perusak nilai-nilai luhur pendiri bangsa ini.

Marjinalisasi dalam kata bermakna denotatif juga bermakna disfemisme. Di antaranya dalam kata atau frasa konsumerisme, gagal, kejahatan, keserakahan, ingkar janji, dan merugikan keuangan negara. Dalam kata konsumerisme, para koruptor dimarjinalisasi sebagai sosok yang konsumtif sehingga mereka pun akhirnya korupsi. Koruptor juga dimarjinalisasi sebagai orang-orang yang dianggap gagal dalam kehidupannya. Kejahatan memarjinalisasi koruptor yang disinonimkan dengan orang yang jahat. Para koruptor juga dimarjinalisasi dengan kata serakah karena perilakunya yang tidak pernah puas dengan uang halal. Para koruptor juga dimarjinalisasi dengan frasa ingkar janji bermakna mereka merupakan kelompok yang tidak jujur dalam hal jabatan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

Marjinalisasi dalam kata bermakna metafora, di antaranya terdapat dalam kata atau frasa memenangkan proyek; penerimaan hadiah; kerap bermain; dan berbagi hasil. Frasa memenangkan proyek memarjinalisasi para koruptor yang dianggap selalu hadir dalam sebuah proyek. Penerimaan hadiah memarjinalisasi koruptor karena mereka dianggap saling memberi dan menerima hasil korupsi. Kerap bermain memarjinalisasi para koruptor karena mereka menganggap korupsi sebagai kegiatan bermain yang menggembirakan. Frasa berbagi hasil juga memarjinalisasi koruptor karena menganggap mereka selalu berkomplot dan membagi-bagi hasil korupsinya.

Suatu peristiwa sering direpresentasikan berbeda oleh media dan tentu saja akan ditafsirkan berbeda pula oleh khalayak. Hal tersebut dimungkinkan karena khalayak tidak hadir secara langsung dalam sebuah peristiwa sehingga mereka hanya mengandalkan sudut pandangnya kepada media. Dampaknya, sudut pandang media seringkali mengontrol pandangan khalayak

terhadap sebuah peristiwa. Eriyanto (2012) mengatakan pengontrolan terhadap sebuah kosakata, informasi dan pengalaman disebut sebagai pembatasan pandangan. Lebih jauh Simpson (2005) mengatakan bahwa pengontrolan terhadap komponen fitur-fitur bahasa tersebut akan merepresentasikan sebuah ideologi.

Pembatasan pandangan dalam kata bermakna konotasi dan metafora, di antaranya terdapat dalam kosakata dan frasa *jual beli jabatan*, *penyalahgunaan*, *hukuman mati*, *menguasai asset secara tidak sah*, *terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi*, dan *titipan*. Media membatasi pandangan khalayak bahwa para koruptor tidak hanya mencuri uang rakyat, bahkan sampai menjual jabatan, tampak dalam frasa *jual beli jabatan*. Kata *penyalahgunaan* membatasi pandangan bahwa para koruptor merupakan kelompok yang sering menyalahgunakan wewenang mereka. Pembatasan pandangan juga tampak dari penggunaan frasa *hukuman mati*, bermakna membatasi pandangan khalayak agar menyepakati pemberian hukuman mati bagi para koruptor. Khalayak dibatasi pandangannya agar menganggap para koruptor sebagai komplotan yang sering *menguasai asset secara tidak sah*. Okezone juga membatasi pandangan khalayak untuk senantiasa melihat para koruptor sebagai komplotan yang layak *dihukum mati*.

Pembatasan pandangan dalam makna bermakna denotatif, di antaranya terdapat dalam kata *kolusi*, *koruptor termuda berusia 25 tahun*, *gratifikasi*, *ingkar janji*, dan *merugikan keuangan negara*. Kata *kolusi* membatasi pandangan seolah para koruptor sering berkolusi dengan koruptor lainnya agar berhasil korupsi. Frasa *koruptor termuda berusia 25 tahun* membatasi pandangan khalayak akan adanya sebuah ironi bahwa para koruptor makin hari berusia muda. Kata *gratifikasi* membatasi pandangan bahwa para koruptor sering memberi dan menerima pemberian yang berasal dari sumber yang negatif. Kata *ingkar janji* membatasi pandangan khalayak bahwa koruptor merupakan orang yang sering tidak menepati janji. Terakhir, para koruptor juga dibatasi pandangannya sebagai sosok yang *merugikan keuangan negara*.

Pembatasan pandangan dalam kata bermakna eufemisme di antaranya terdapat dalam frasa *pemberian dan penerimaan hadiah*, *transaksi keuangan yang janggal*, *transaksi mencurigakan*, dan *kerap bermain*. Para koruptor dibatasi pandangannya sebagai *komplotan yang sering memberi maupun menerima hadiah*. Hadiah dalam konteks ini merupakan hal yang berasal dari sumber-sumber yang negatif. Para koruptor juga dibatasi pandangannya sebagai pihak-pihak yang sering melakukan *transaksi keuangan yang janggal*, *mencurigakan*, atau *tidak normal*. Frasa *kerap bermain* membatasi pandangan para koruptor sebagai komplotan yang korupsi untuk tujuan bergembira. Bagi para koruptor korupsi diibaratkan sebagai permainan yang menggehirkan dan harus diselesaikan.

Penggunaan bahasa disfemisme dalam bentuk pembatasan pandangan, pengklasifikasian, dan pamarjinalan terhadap korupsi dan para koruptor merepresentasikan situs Okezone.com berpihak dan berideologi antiterhadap korupsi. Hal tersebut harus diapresiasi karena Okezone.com secara aktif mengonstruksi realitas dengan berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi. Konstruktivitas tersebut tentu harus menjadi prioritas karena menurut McQuail's (2011) secara normatif media massa harus fokus dan mendukung kepentingan masyarakat sehingga siapapun yang mendirikan media akan memproduksi berita untuk kepentingan masyarakat. Terlebih dalam pendekatan kritis terdapat asumsi bahwa penggunaan bahasa berbeda terhadap sebuah realitas akan berdampak terhadap persepsi yang diterima khalayak (Qianbo, 2016).

Persepsi yang dibangun berupa disfemisme terhadap korupsi dan para koruptor, bila konsisten dikonstruksi oleh media massa, akan berdampak terhadap hukuman sosial dalam bentuk stigmatisasi. Hal tersebut terjadi karena bahasa disfemisme sebenarnya memiliki fungsi, tidak sekadar fungsi yang berkonotasi negatif. Di sisi lain, disfemisme baik dalam bentuk bahasa sinisme, sarkasme, ejekan, dan pengasaran lainnya, sebenarnya memiliki fungsi positif, yaitu untuk mengkritik dalam rangka mengevaluasi, mengkritik dalam rangka memberi saran, dan mengkritik dalam rangka menyatakan kekecewaan (Pratiwi, 2021).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap 30 berita bertopik korupsi di Okezone.com ditemukan 21 kata dan 51 frasa yang dapat dikategorikan bermakna disfemisme. Pendisfemisme tersebut tampak dalam pembatasan pandangan, pamarjinalan, dan pengklasifikasian kata dan frasa berkaitan dengan korupsi. Ketiga hal tersebut digunakan untuk membuat korupsi dan para koruptor bercitra buruk. Disfemisme juga digambarkan dalam bentuk bahasa sinisme dan sarkasme yang juga bertujuan memburukkan citra korupsi dan para koruptor. Sementara dalam perspektif semantik, setidaknya ditemukan empat kategorisasi makna, yaitu denotatif yang digunakan untuk tujuan menggambarkan korupsi dengan makna sebenarnya, langsung, dan tidak multitafsir. Makna konotatif termasuk juga idiom yang digunakan untuk memasukkan nilai rasa agar khalayak memiliki persepsi negatif yang kuat mengenai korupsi. Makna metafora yang digunakan untuk membandingkan korupsi dan para koruptor dengan hal yang negatif. Terakhir, makna eufemisme yang tidak dapat dianggap sebagai upaya untuk menghaluskan makna karena tetap berasosiasi dengan korupsi yang sudah bercitra negatif.

Peran aktif media massa khususnya Okezone.com dalam mendisfemismekan kosakata dan frasa korupsi sebagai sanksi sosial merupakan hal yang harus diapresiasi. Karena korupsi sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan, maka penanganan korupsi tidak dapat dilaksanakan secara parsial. Pemerintah disarankan menginisiasi dan mengupayakan secara sungguh-sungguh melalui kerjasama antar lembaga, masyarakat, termasuk media massa. Tujuannya untuk memberikan hukuman sosial sebagai pelengkap hukuman pidana agar mampu meminimalisasi bahkan menghilangkan korupsi. Media massa pun direkomendasikan untuk konsisten menggunakan bahasa disfemisme dalam pemberitaan berkait korupsi agar sanksi sosial bisa dilaksanakan efektif, berkelanjutan, dan dalam rentang waktu yang panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Y., Kurniawan, M. H., & Kusumawardhani, P. (2022). Ideologi jpnn.com dan merdeka.com dalam wacana putusan mahkamah konstitusi tentang uu cipta kerja nomor 11 tahun 2020. *Disastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4 (2), 187-197. <http://dx.doi.org/10.29300/disastra.v4i2.6395>
- Alakhunova, N, Oumar, D., Isabel M. D C., & Whitney, T. (2015). Defining marginalization: an assessment tool. Washington: The George Washington University the Elliott School Of International Affairs & WFTO-Asia. Retrieved from <https://elliott.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2141/f/World%20Fair%20Trade%20Organization.pdf>.
- Allan, K., & Burrige, K. (2011). *Forbidden words taboo and the censoring of language*. New York: Cambridge University Press.
- Altheide, D. L. (2007). The mass media and terrorism. *Discourse & Communication*, 1(3), 287-308.

- Anjani, L. D., & Ginanjar, B. (2021). Fenomena disfemisme dalam kartun anak pada pertelevisian Indonesia. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 10(1), 1-12. <https://doi.org/10.26499/rnh.v10i1.1787>.
- Anshori, D. (2018). Stigma negatif bahasa korupsi dalam pemberitaan media massa. *Jurnal Litera*, 17 (2), 162-174. <https://doi.org/10.21831/ltr.v17i2.18581>
- Anwas, O. M. (2011). Membangun media massa publik dalam menanamkan pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17 (6), 680-690. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i6.59>.
- Asad, S., Noor, S.F. B.M.N., Indah, R. N., & Jaes, L. B. (2021). Attitude realization in news reports: An interpretation through an appraisal analysis. *Indonesian Journal Of Applied Linguistics*. 11 (1), 177-186. <https://doi.org/10.17509/ijal.v10i3.31763>
- Astuti, P. (2013). Politik korupsi: kendala sistemik pemberantasan korupsi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. 2 (1), 5-17. <https://doi.org/10.14710/politika.2.1.2011.5-17>.
- Burridge, K. (2012). Euphemism and language change: the sixth and seventh ages. *Journal in English Lexicology*. 7 (1), 65-92. <https://doi.org/10.4000/lexis.355>
- Cervera, J. T., Postigo, M. L., & Herrero, R. D. (2006). What is critical discourse analysis?. *Quaderns de Filologia-Estudis Lingüístics*, 11, 9-34.
- Chaer, A. (2006). *Tata bahasa praktis bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Derana, G. T. (2016). Bentuk marginalisasi terhadap perempuan dalam novel tarian bumi karya oka rusmini. *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 2(2), 166-171. <https://doi.org/10.22219/kembara.v2i2.4001>
- Dihni, V. A. (2022, April 19). Tren kerugian negara akibat korupsi meningkat dalam 5 tahun terakhir. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>.
- Duda, B. (2011). Euphemisms and dysphemisms: in search of a boundary line. *Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, 45, 3-19.
- Elvinaro. (2007). *Komunikasi massa suatu pengantar*. Bandung : Simbosa Rekatama Media.
- Eriyanto. (2012). *Analisis wacana: pengantar analisis media*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Fiske, J. (2004). *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Fowler, R. (1991) *Language in the news: discourse and ideology in the press*. New York: Routledge.
- Habiburrahim, H., Rahmiati, Z., Muluk, S., Akmal, S., & Aziz, Z. A. (2020). Language, identity, and ideology: Analysing discourse in Aceh sharia law implementation. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 9(3), 599-607. <https://doi.org/10.17509/ijal.v9i3.23210>
- Hadi, L. (2021, Oktober 8). Peringkat 20 besar situs media online indonesia. Retrieved from <https://surabaya.jatimnetwork.com/teknologi/pr-521371071/peringkat-20-besar-situs-media-online-indonesia-oktober-2021?page=2>.
- Halik, A. (2013). *Komunikasi massa*. Makassar: Alauddin University Press.
- Husek, A. F., Wert, M. J. V., Ewing, W. F., Grosso, A.L., Holland, C. E., Katteri, R., Rosman, L., Agarwal, A., & Baral, S.D . (2017). Measuring stigma affecting sex workers (SW) and men who have sex with men (msm): a systematic review. *PLoS ONE*, 12(11). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188393>
- Husna, A., Devi, E. K., Masdita, F. I., & Ardiansyah, M. A. (2020). Disfemisme pada unggahan akun Twitter areajulid. *CaLLs (Journal of Culture, Arts, Literature, and Linguistics)*, 6(2), 254-266. <http://dx.doi.org/10.30872/calls.v6i2.2842>.
- Keraf, G. (1998). *Diksi dan gaya bahasa*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.

- Mahsun. (2017). *Metode penelitian bahasa edisi ketiga (tahapan, strategi, metode dan tekniknya)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- McQuail's, D. (2011). *Mass communication theory*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Minto, D. W. (2002). Analisis wacana kritis perspektif kalimat dalam talk show mata najwa tentang UU omnibus law cipta kerja di Trans7. *Semantik*, 11 (1), 111-123.
- Natalia, D. L. (2019). Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2), 57-73. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.472>.
- Pratiwi, D. (2021). Pendayagunaan gaya bahasa sindiran dalam tayangan ini talk show. *JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts*, 1(10), 1325-1340.
- Qianbo, L. (2016). Theoretical framework of critical discourse analysis. *Studies in Literature and Language*, 13 (5), 36-40.
- Radityo, M. (2022, Mei 22). Data ICW kasus dan pelaku korupsi meningkat usia termuda 24 tahun. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-icw-kasus-dan-pelaku-korupsi-meningkat-usia-termuda-24-tahun.html>.
- Ristanto, B. (2019). Efek penggunaan disfemia dalam teks media. *Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya*. 3 (2), 161-172.
- Riwukore, J. R., Manafe, H., Habaora, F., Susanto, Y., & Yustini, T. (2020). Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di pemerintah kota kupang, provinsi nusa tenggara timur. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. 11 (2), 229-242.
- Simarmata, L. P. (2021). Korupsi sekarang dan yang akan datang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 19 (2), 87-99. <https://doi.org/10.35968/jihd.v11i2.770>
- Simpson, P. (2005). *Language, ideology and point of view*. London and New York: Routledge.
- Sofiana, N, Arsiantie, F., Rosmana, N. A., & Febriati, S. (2013). women representation in lifesyle magazine: (content analysis in magazine of cosmopolitan within 2003-2005). *Jurnal Kominfo*. 17 (1), 39-74. <https://doi.org/10.31445/jskm.2013.170103>
- Sosiawan, U. M. (2017). Peran komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19 (4), 517-538. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>.
- Sulistiyo, U., Supiani, Kaliani, A., & Lestariana, R.P.D. (2020). Infusing moral content into primary school english textbooks: a critical discourse analysis. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*. 10(1), 251-260. <https://doi.org/10.17509/ijal.v10i1.2506>.
- Ullman, S. (1953). Descriptive semantics and linguistic typology. *WORD*, 9 (3), 225-240.
- Untari, P.H. (2019, Mei 20) Geser detik.com jadi portal berita nomor 2 di Indonesia. Retrieved from <https://techno.okezone.com/read/2019/05/20/207/2057940/geser-detik-com-okezone-com-jadi-portal-berita-nomor-2-di-indonesia>.
- Wibisono, P. & Sari, P. (2021). Analisis semiotika Roland Barthes dalam film bintang ketjil karya Wim Umboh dan Misbach Yusa Bira. *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, 7, (1), 30-43.